BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan masyarakat dewasa ini cenderung menginginkan sesuatu yang serba cepat, praktis efektif dan efisien. Disamping itu kemajuan zaman yang mendorong cepatnya perkembangan tekhnologi membuat sistem-sistem yang ada sekarang ini sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan berganti dengan sistem-sistem yang jauh lebih baik yang bisa bekerja dengan cepat, praktis efektif dan efisien.

Dalam rangka mencapai kebutuhan masyarakat yang semakin maju dalam segala bidang baik dalam bidang tekhnologi maupun bidang lainnya, kebutuhan akan sistem yang memadai dan memenuhi kriteria sebagai sebuah sistem yang sesuai kebutuhan sangatlah dibutuhkan. Komputer dalam hal ini hanya sebagai alat bantu untuk membantu sebuah sistem untuk berjalan dengan baik antara lain untuk membantu proses-proses, menyimpan dan memperoleh data. Kebutuhan akan informasi sangatlah penting untuk menunjang kesuksesan dan kemajuan suatu organisasi oleh karena itu hampir semua organisasi sangatlah membutuhkan informasi yang akurat, aktual dan relevan untuk kegiatan di dalam organisasi tersebut.

Sistem informasi akademik adalah inti dalam mengatur segala hal yang berkaitan dengan pungutan pajak daerah kota bandung, maupun hal-hal lainnya. Dalam hal ini PEMKOT (Pemerintahan Kota) bandung, sebagai tujuan kami

menginginkan sebuah sistem yang bisa mengakomodir kebutuhan bagi kegiatan akademik. Bagian tata usaha merasa tidak efektif dalam bekerja ini disebabkan proses pengerjaannya tergolong masih manual akibatnya sering terjadi ketidakpuasaan pelayanan kepada masyarakat karena ketidaksesuaian jumlah sumber daya yang ada dalam melayani masyarakat, pemerintahan daerah sebagai ujung tombak pemberlakuan otonomi daerah sesuai undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah meyebabkan masing-masing daerah berusaha mampu memberdayakan sumber kekayaan dan pendapatan asli daerahnya guna membiayai pelaksanaan pembangunan, khususnya pembangunan daerah, dan umumnya pembangunan nasional. Prosedur pemungutan yang kurang efektif karena sistem yang telah ditetapkan belum berjalan sebagaimana mestinya.

Untuk memecahkan masalah di atas maka dibutuhkan suatu sistem yang bisa mengatasi masalah-masalah tersebut. Dalam hal ini penulis berencana membangun Sistem Informasi Pungutan Pajak yang diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah tersebut di atas.

1.2 Identifikasi Dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Kebutuhan akan sebuah sistem yang memadai untuk memproses data sangatlah di butuhkan terlebih lagi dengan ruang lingkup yang besar tidak mungkin suatu proses memakai sistem informasi yang kurang memadai. Untuk itu perlu dibangun sebuah sistem yang dapat mewadahi kebutuhan akan sebuah

sistem yang dianggap layak untuk di pakai dalam memproses data. Dengan melihat hal di atas maka dengan ini penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut :

1. Belum efektifnya pungutan pajak di pemerintahan daerah kota bandung
2. Lamanya data penanggung jawab/wajib pajak sehingga ketika terdapat tunggakan sulit untuk ditagih

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana membuat sistem informasi pungutan pajak secara sistematik dan terintegrasi.
2. Bagaimana memberikan laporan sangsi penunggak pajak.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari penelitian penulisan KP(kerja peraktek), ini adalah untuk membangun sebuah sistem Perpajakan yang ada di Pemerintahan Kota Bandung ini berbasis *client-server* yang diharapkan dapat berguna untuk mempermudah di dalam pemrosesan data agar bisa lebih mengefektifkan waktu

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan yang diharapkan dari hasil penelitian pada kegiatan tersebut adalah:

1. Untuk membuat perancangan sistem informasi Perpajakan dipemerintahan daerah kota bandung
2. Membuat aplikasi perangkat lunak agar laporan pengabsenan bisa diproses dengan cepat
3. Mengintegrasikan sistem yang berhubungan dengan kegiatan perpajakan

1.4. Metode Pengembangan Sistem

kegunaan dari metode pengembangan sistem ini :

1. Bagi dunia ilmu pengetahuan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan khasanah dalam pembangunan sistem informasi Perpajakan Daerah Kota Bandung
2. Bagi penulis, dapat memberikan wawasan pemungutan perpajakan melalui penerapan yang telah dipelajari serta dapat mengetahui tentang Sistem Informasi perpajakan.

1.5. **Batasan Masalah**

Banyaknya Permasalahan yang ada di Organisasi Pemerintahan Kota Bandung mengenai proses yang ada, maka penulis membatasi masalah yang akan di bahas sehingga pembahasan bisa lebih terarah dan jelas, oleh karena itu penulis membatasi masalah sebagai berikut :

1. Penulis hanya membuat sistem informasi tentang Sistem Perpajakan dipemerintahan kota bandung ini saja
2. Sistem yang digunakan berbasis *Client-server*.

1.6. **Lokasi dan Jadwal Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini penulis meneliti di PEMKOT(Pemerintahan Kota) bandung yang beralamat di jalan wastukencana no .2 telepon (022)4235052.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Sistem

Di dalam pendefinisian mengenai sistem terdapat dua kelompok pendekatan yang berkaitan dengan sistem yaitu sistem yang lebih menekankan kepada prosedur dan elemen. Menurut pendekatan prosedur sistem didefinisikan sebagai suatu urut-urutan yang tepat dari tahapan-tahapan instruksi yang menerangkan apa yang harus dikerjakan, siapa yang mengerjakan, kapan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Sedangkan menurut pendekatan secara elemen sistem didefinisikan sebagai bagian-bagian yang saling berkaitan yang beroperasi bersama untuk mencapai beberapa sasaran atau maksud.

Berikut beberapa pendapat mengenai Sistem :

" Sistem adalah kumpulan/group dari bagian/komponen apapun baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu "

Dari definisi diatas terlihat jelas bahwa sebuah sistem merupakan sebuah kumpulan atau Group dari bagian atau komponen yang berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu yang ingin dicapai dengan dibuatnya sebuah sistem tersebut.

"Suatu sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan satu dengan yang lain, berkumpul bersama untuk

melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu"

"Sistem adalah sekumpulan komponen yang mengimplementasi model dan fungsionalitas yang dibuthkan. Komponen-komponen tersebut saling berinteraksi di dalam sistem guna mentrans-formasi *input* yang diberikan kepada sistem tersebut menjadi sebuah *output* yang berguna dan bernilai bagi *actor*-nya"

Dari definisi diatas kita dapat mengetahui bahwa sebuah sistem terdiri dari input dan output dimana input tersebut memberi masukan kedalam suatu sistem kemudian oleh sistem tersebut input diubah menjadi output yang berguna dan bernilai bagi aktor.

2.1.1 Elemen Sistem

Sistem informasi terdiri dari komponen-komponen yang disebut blok bangunan (*building block*). Sebagai suatu sistem, blok tersebut saling berinteraksi satu dengan lainnya membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan. Blok bangunan tersebut terdiri dari enam blok, yaitu :

1. Blok Masukan (*Input Block*)

   Input mewakili data yang masuk ke dalam sistem informasi. *Input* disini mewakili metode-metode dan media untuk menangkap data yang akan dimasukkan, yang dapat berupa dokumen-dokumen dasar.

2. Blok Model (*Model Block*)

Blok ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika, dan model matematik yang akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan di basis data dengan cara yang tertentu untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan.

3. Blok Keluaran (*Output Block*)

Produk dari sistem informasi adalah keluaran yang merupakan informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen serta semua pemakai sistem.

4. Blok Teknologi (*Technology Block*)

Teknologi digunakan untuk menerima *input*, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirim keluaran dan membantu pengendalian dari sistem secara keseluruhan. Teknologi terdiri dari tiga bagian utama, yaitu teknisi (*humanware* atau *brainware*), perangkat lunak (*software*), dan perangkat keras (*hardware*).

5. Blok Basis Data (*Database Block*)

Basis data merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan satu dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Data perlu disimpan di dalam basis data untuk keperluan penyediaan informasi lebih lanjut. Data didalam basis data perlu diorganisasikan sedemikian rupa, supaya informasi yang dihasilkan berkualitas.

2.1.2 Karakteristik Sistem

Sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu, antara lain:

a. Komponen Sistem

   Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang artinya saling bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen sistem atau elemen-elemen sistem dapat berupa suatu sub sistem atau bagian-bagian dari sistem.

b. Batas Sistem

Batas sistem merupakan suatu daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya.

c. Lingkungan Luar Sistem

Lingkungan luar dari suatu sistem adalah apapun di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar sistem dapat bersifat menguntungkan dan juga merugikan. Lingkungan luar yang menguntungkan merupakan energi dari sistem sedangkan lingkungan luar yang merugikan harus ditahan dan dikendalikan..

d. Penghubung Sistem

Penghubung merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem yang lainnya. Melalui penghubung ini kemungkinan sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem.

e. Masukan Sistem

Masukan adalah energi yang dimasukan ke dalam sistem. Masukan dapat berupa masukan perawatan dan masukan sinyal *maintenance input.*

f. Keluaran Input.

Keluaran adalah energi yang diolah atau diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna. Keluaran dapat berupa masukan bagi susbsistem yang lain

g. Pengolahan Sistem.

Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah atau sistem itu sendiri sebegai pengolahnya. Pengolah itu yang akan merubah masukan menjadi keluaran.

h. Sasaran Sistem

Suatu sistem harus mempunyai tujuan dan sasaran, kalau sistem tidak mempunyai sasaran maka sistem tidak akan ada. Suatu sistem dikatakan berhasil bila mengenai sasaran atau tujuannya. Sasaran sangat berpengaruh pada masukan dan keluaran yang dihasilkan.

2.1.3 Klasifikasi Sistem

Sistem merupakan suatu bentuk integrasi antara satu komponen dengan komponen lainnya. Karena suatu sistem memiliki sasaran yang berbeda untuk setiap kasus yang terjadi dan yang ada di dalam sistem tersebut.

Oleh karena itu sistem dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa sudut pandang antara lain [LADJ05]:

a. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik sedangkan sistem fisik adalah sistem yang ada secara fisik.
b. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi karena proses alam dan tidak dibuat oleh manusia sedangkan

sistem buatan manusia adalah sistem yang dirancang oleh manusia.

c. Sistem diklasifikasikan sebagai Sistem Tertentu (*Deterministic system*) dan Sistem Tak Tentu (*Probabilistic System*). Sistem tertentu beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi sedangkan sistem tak tentu adalah Sistem tak tentu adalah sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas.

d. Sistem diklasifikasikan sebagai Sistem Tertutup dan Sistem Terbuka. Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Sistem ini bekerja secara otomatis tanpa adanya turut campur dari pihak luarnya. Sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dan terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Sistem ini menerima masukan dan menghasilkan keluaran untuk lingkungan luar atau subsistem yang lainnya.

2.2 Pengertian Informasi

Informasi merupakan hal yang sangat penting di dalam sebuah sistem. Jika sebuah sistem mengolah informasi yang salah maka penerima informasi akan susah untuk mengambil keputusan masa kini atau masa yang akan datang.

Berikut beberapa definisi mengenai informasi :

"Informasi adalah data yang sudah diolah, dibentuk atau dimanipulasi sesuai dengan keperluan tertentu"

Informasi berasal dari data. Data adalah kenyataan yang menggambarkan kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Kejadian (*event*) adalah sesuatu yang terjadi pada saat tertentu. Informasi diperoleh setelah data-data mentah diproses atau diolah.

2.2.1 Pengolahan data (*Data Processing*)

Berikut beberapa operasi yang ada di dalam pengolahan data :

a. Data masukan

   Data masukan adalah kumpulan data transaksi ke sebuah pengolahan data medium

b. Data Transformasi

   Data transformasi merupakan penghitungan atau pengelompokan terhadap kelompok kelompok tertentu. Beberapa contoh bentuk data transformasi :

   1. Kalkulasi operasi aritmatik terhadap data *field*
   2. Menyimpulkan proses akumulasi beberapa data
   3. Melakukan klasifikasi terhadap data group-group tertentu

c. Informasi keluaran

   Informasi keluaran adalah proses menampilkan informasi atau hasil dari pengolahan data.

2.2.2 Kualitas Informasi

Kualitas informasi (*quality information*) sangat dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya:

1. Relevan (*relevancy)*

Sejauh mana tingkat relevansi informasi tersebut terhadap kenyataan kejadian masa lalu, masa sekarang dan kejadian yang akan datang.

2. Akurat (*accuracy*)

Suatu informasi harus memenuhi syarat yang satu ini karena suatu informasi akan sangat berharga atau berkualitas jika sangat akurat.

3. Tepat Waktu (*timelinss*)

Berarti informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. Suatu informasi harus sesuai dengan keadaan saat itu. Keterlambatan suatu informasi bisa berakibat fatal bagi suatu organisasi atau pemakainya hal ini dikarenakan informasi merupakan landasan dalam pengambilan keputusan.

4. Ekonomis (*economy*)

Informasi yang dihasilkan harus mempunyai daya jual yang tinggi dan biaya operasional yang harus dikeluarkan untuk menghasilkan informasi tersebut harus minimal.

5. Efisien (*efficincy*)

Informsi yang berkualitas harus memiliki kalimat yang sederhana dan mudah dimengerti, tapi bisa memberikan makna yang mendalam

6. Dapat Dipercaya *(reliability*)

Informasi yang didapat harus dari sumber yang bisa dipercaya. Sumber tersebut juga harus sudah teruji kejujurannya.

2.2.3 Nilai Infomasi

Nilai dari suatu informasi (*value of information*) ditentukan dari dua hal, yaitu manfaat dan biaya mendapatkannya. Suatu informasi dikatakan bernilai bila manfaatnya ebih efektif dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. Namun kenyataannya, sebagian besar informasi tidak dapat persis ditaksir keuntungannya dengan suatu nilai uang, tetapi dapat ditaksir nilai efektivitasnya.

2.3 Pengertian Sistem Informasi

Beberapa Definisi dari sistem informasi adalah sebagai berikut:

a. Suatu sistem yang di buat oleh manusia yang terdiri dari komponen-komponen dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan yaitu menyajikan informasi.
b. Sekumpulan prosedur organisasi yang pada saat dilaksanakan akan memberikan informasi bagi pengambil keputusan dan atau untuk mengendalikan organisasi.
c. Suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi, mendukung operasi,, bersifat

manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan

2.4 Metode Analisis dan Perancangan Terstruktur

- Analisis

Analisis adalah mempelajari masalah-masalah yang timbul dan kemudian memperbaiki berbagai fungsi yang ada di dalam sistem yang sedang berjalan agar menjadi lebih efisien.

- Perancangan

Perancangan adalah menentukan bentuk dari sistem yang akan dibuat yang sesuai dengan kebutuhan pemakai yang telah dianalisis terlebih dahulu, termasuk di dalamnya input dan output sistem.

2.4.1 Flowmap/*Block Chart*

Flow Map adalah peta (map) yang menunjukan alir (flow) di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Peta alir digunakan terutama untuk alat bantu komunikasi dan untuk dokumentasi. Peta alir merupakan bagian dari informasi yang menerangkan proses-proses sistem informasi tersebut.

2.4.2 Diagram Konteks

Diagram Konteks Merupakan model grafis yang memperlihatkan sistem dalam bentuk paling umum/global dan digunakan untuk mendefinisikan serta memperlihatkan lingkup atau batas sistem yang akan ditelaah (area studi),

disamping hubungannya dengan sistem lain. Diagram konteks menunjukan data yang mengalir dari dan ke terminator (asal data).

2.4.3 Data Flow Diagram

Data Flow Diagram adalah suatu model logika data atau proses yang dibuat untuk menggambarkan darimana asal data dan kemana tujuan data yang keluar dari sistem, dimana data disimpan, proses apa yang menghasilkan data tersebut dan interaksi antara data yang tersimpan dan proses yang dikenakan pada data tersebut. Data Flow Diagram dapat menggambarkan penyimpanan data dan proses yang mentransformasikan data juga dapat menunjukan hubungan antara data dan sistem dan proses pada sistem.

2.4.4 Kamus Data

Kamus data adalah kumpulan elemen-elemen atau simbol-simbol yang digunakan untuk membantu dalam penggambaran atau pengidentifikasian setiap *field* atau *file* di dalam sistem.

2.4.5 Perancangan Basis Data.

Basis data adalah suatu sistem informasi yang mengintegrasikan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya.

2.4.5.1 Normalisasi

Normalisasi adalah suatu tekhnik untuk mengorgainisasi data ke dalam tabel untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam suatu organisasi.

Tujuan normalisasi :

1. Untuk menghilangkan kerangkapan data.
2. Untuk mengurangi komplektisitas.
3. Untuk mempermudah pemodifikasian data.

Ada beberapa urutan dalam melakukan normalisasi diantaranya adalah sebagi berikut :

1. Bentuk normal ke satu (1 Nf)

   Menghilangkan beberapa perulangan group data pada tabel dan mengidentifikasikan tabel dengan memberikan primary key pada tabel.

2. Bentuk normal kedua (2Nf)

   Buat tabel barudimana semua field-fieldnya sudah bergantung penuh pada primary key dan ciptakan hubungan anta tabel dengan menggunakan *foreign key*.

3. Bentuk Normal ketiga (3Nf)

   Hilangkan ketergantungan transitif pada tabel, yaitu field yang tidak bergantung pada *primary key*.

2.4.5.2 Relasi Tabel

Relasi tabel adalah hubungan antara dua tabel atau lebih dengan menggunakan atribut kunci sebagai penghubungnya. Atribut adalah properti atau ciri dari sebuah entitas atau objek.

2.4.5.3 Entity Relationship Diagram

Model data ERD adalah model data yang didasarkan pada sebuah persepsi terhadap sebuah dunia nyata yang di dalamnya terdapat sekumpulan objek dasar dan relasi antar objek-objek tersebut.

Jenis-jenis hubungan dalam *Entity Relationship Diagram* (ERD) :

1. Satu ke satu.
2. Satu ke banyak / banyak ke satu.

2.4.6. Pengertian Prosedur

Dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintah di Bidang Pendapatan Daerah berdasarkan asas otonomi (Memungut Pajak Daerah) dan Pembantuan (Dinas Perimbangan) menggunakan prosedur-prosedur yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota (PERWAL) Nomor 330 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Prosedur Penetapan Pajak Daerah. Prosedur tersabut dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan suatu kegiatan agar lebih teratur.

Menurut Cecil Gillespie dalam bukunya *Accounting System Procedure And Method* yang dikutip oleh La Midjan dan Azhar

Susanto dalam bukunya Sistem Informasi Akuntansi (2007:264) pengertian prosedur yaitu :

"prosedur adalah suatu urutan-urutan dari pekerjaan tata- usaha (Clerical Operation) yang biasa melibatkan beberapa petugas didalam suatu bagian atau lebih yang diadakan berulang-ulang didalam perusahaan atau instansi".

Menurut Mulyadi dalam buknya Sistem Informasi Akuntansi (2001:5) pengertian prosedur yaitu :

"prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang".

Jadi menurut definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa suatu system terdiri dari jaringan prosedur, sedangkan prosedur merupakan urutan-urutan kegiatan klirekal dari pekerjaan tata usaha yang biasanya melibatkan beberapa petugas didalam suatu bagian atau lebih yang diadakan untuk menjamin pelaksanaan yang seragam transaksi-transaksi ini terjadi secara berulang-ulang didalam perusahaan atau instansi.

2.4.7 Pengertian Pajak

Banyak definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli, yang satu sama lain pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah untuk dipahami.

Perbedaan nya hanya terletak pada sudut pandang yang digunakan oleh masing-masing pihak pada saat merumuskan pengertian pajak.

Pengertian pajak menurut P.JA Andriani yang dikutip oleh Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2008:21) adalah sebagai berikut :

"Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan".

Yang di maksud dengan kata " dapat dipaksakan " adalah jika utang pajak tidak di bayar,maka utang tersebut dapat di tagih dengan menggunakan kekuasaan,seperti surat paksa dan sita serta juga adanya penyanderaan.

Kemudian,pengertian pajak menurut C.F Bastable yang di kutip oleh Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:25) adalah sebagai berikut :

" Tax compulsory contribution o the wealth o a person or body of person for the sevice of the public power."

Menurut pasal 1 Undang – undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pengertian pajak adalah :

"**Pajak adalah kotribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-**

undang, dengan tidak mendapat imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

BAB III

PROFIL PERUSAHAAN

3.1. Tinjauan Umum Perusahaan

3.1.1. Sejarah Singkat Pendirian Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung

Berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung membawahi 5 (lima) satuan kerja yaitu :

1. Bagian Perpajakan dan Retribusi (BAPAR).
2. Bagian Iuran Rehabilitasi Daerah (IREDA).
3. Bagian Eksploitasi Parkir (BEP).
4. Bagian Perusahaan Pasar (BPP).
5. Bagian Tata Usaha Dalam (TUD).

Pada tahun 1980, dikeluarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor: 09/PD 19870 tanggal 10 juli 1980, dimana Stuktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung mengalami perubahan, semula membawahi 5 (lima) satuan unit kerja dirubah menjadi 7 (tujuh) satuan unit kerja, yaitu :

1. Sub Bagian Tata Usaha
2. Seksi Pajak

3. Seksi Retribusi
4. Seksi IPEDA
5. Seksi Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan
6. UPTD Pasar
7. UPTD Parkir dan Terminal

Dalam kegiatan satuan operasional satuan unit kerja tersebut diatas, khusus nya dalam bidang pemungutan pajak/retribusi, dipakai sistem MAPENDA (Manual Administrasi Pendapatan Daerah) sebagai landasan bagi penyelenggara Pengelolaan Pendapatan Daerah serta Dinas Pendapatan Tingkat I maupun tingkat II yang merupakan Pendoman dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 970-830 Tahun 1981 serta keputusan Menteri dalam negeri No. KUPD 7/12/41-101 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II. Dengan sistem MAPENDA, petugas melakukan kegiatan pemungutan pajak/retribusi secara langsung kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi "Door to door".

Guna terdapat keseragaman struktur dinas pendapatan daerah diseluruh indonesia, dikeluarkan keputusan menteri dalam negeri No. 23 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II, yang tindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, yaitu peraturan Daerah Kotamadya Bandung No. 11 tahun 1989, tanggal 30 oktober 1989 tentang susunan organisasi dan Tata kerja Dinas Pendapatan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Mendagri No. 23 Tahun 1989 perlu disusun Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang lebih mutakhir sebagai penyempurnaan dari sistem dan prosedur yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan Keputusan Mendagri No. 102 Tahun 1990 Tentang Sistem Prosedur Perpajakan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya, serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II seluruh Wilayah Indonesia atau yang lebih dikenal dengan nama **MAPATDA (Manual Pendapatan Daerah).**

Dengan diberlakukannya MAPATDA, maka Sistem Pemungutan Pajak/Retribusi Daerah yang sebelumnya dilakukan secara " **Door to door"** menjadi "**Self Assesment"** yaitu, wajib pajak dan wajib retribusi menyetor langsung kewajiban pembayaran pajak/retribusi ke Dinas Pendapatan Daerah. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajk Daerah dan Retribusi Daerah, maka Kaputusan Mentri Dalam Negri Nomor 978-893 Tahun 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah dan Keputusan Mentri Dalam Negri Nomor 102 Tahun 1990 tentang sistem dan prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II seluruh Wilayah Indonesia, sudah tidak sesuai lagi berdasarkan pertimbangan tersebut. Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain perlu di atur kembali dengan Keputusan Mentri dalam Negeri yaitu **"Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999**

tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retibusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain Menteri Dalam Nageri".

3.1.2. Visi dan Misi Perusahaan

3.1.2.1 Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung

Visi dari Dinas Pendapatan Kota Bandung tertuang dalam pernyataan sebagai berikut :

"**Proesional Dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah, Prima Dalam Pelayanan Menuju Kota Jasa Yang Bermartabat".**

Dalam pernyataan Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung tersebut terdapat kata-kata kunci, sebagai berikut :

1. **Profesionalisme** yaitu suatu kondisi yang harus ada dan dimiliki dalam melaksanakan kewenangan tugas dan fungsi meliputi : kompetensi dalam arti mempunyai keterampilan dan pengetahuan serta sikap dan prilaku yang harus dimiliki setiap aparatur agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara berdayaguna dan berhasilguna serta memiliki komitmen, tanggung jawab, kritis dan cepat tanggap.
2. **Pengelolaan Pendapatan** yaitu sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 (Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).
3. **Prima dalam Pelayanan** yaitu pelayanan yang terbaik yang diberikan dalam bidang administrasi pemrintah, administrasi pembangunan dan administrasi umum kepada Perangkat Daerah secara akomodatif, efektif dan efisien.

Akomodatif yaitu mampu memenuhi tuntutan pelaksanaan kewenangan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

3.1.2.2. **Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung**

Misi merupakan suatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan, maka misi Dinas Daerah Kota Bandung adalah :

1. Meningkatkan kualitas dan mendayagunakan aparatur dilingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2. Menata Sistem dan Prosedur serta Pengawasan dan Pengendalian Pendapatan Daerah.
3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas Sarana dan Prasarana Aparatur dalam mendukung penyelenggaraan Pelayanan Prima.

3.2. Deskripsi Kerja

A. KEPALA DINAS

1. Merumuskan, dan menetapkan rencana dan program kerja Dinas Pendapatan sesuai dengan kebijakan Walikota.
2. Menetapkan rencana streategi dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pendapatan guna mewujudkan Visi dan Misi Kota Bandung.

3. Membina pelaksanaan program dan kegiatan Dinas di bidang perencanaan, Pajak Daerah, Pendapatan Bukan Pajak Daerah serta Pengendalian.
4. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pendapatan daerah.
5. Membagi tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
6. Memaraf dan menandatangani Naskah Dinas sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan yang dimilikinya bedasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Membuat telaahan staf dibidang Perencanaan, Pajak Daerah, Bidang Pendapatan Bukan Pajak Daerah, dan Pengendalian sebagai bahan pertimbangan bagi pemimpinan dalam pengambilan keputusan dan bahan perumusan kebijakan dibidang pendapatan.
8. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

B. SEKRETARIAT

1. Seketariat mempuyai tugas pokok melaksanakan sebagai tugas dinas di bidang Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, program dan keuangan.
2. Sekretariat mempunyai fungsi :
   a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan:

b. Melaksanakan kesekretariatan dinas yang meliputi Admistrasi umum dan Kepegawaian, program dan Keuangan:
c. Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta kegiatan dinas.

Sub bagian umum dan Kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas secretariat di bidang umum dan pegawaian.

Sub Bagian Keuangan dan Program

Sub bagian keuangan dan program mempunyai tugas pokok melaksanan sebagian tugas sekrtariat di bidang keuangan dan program.

C. BIDANG PERENCANAAN

Bidang perencanaan mempunyai tugas pokok meleksanakan sebagian tugas dinas di bidang perencanaan.

Seksi data dan potensi pajak

Seksi data dan potensi pajak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang perencanaan di bidang data dan potensi data.

Seksi program

Seksi program mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas bidang perencanaan di bidang program.

Seksi analisa dan pelaporan

Seksi analisa dan pelaporan mempuyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang perencanaan di bidang analisa dan pelaporan.

D. BIDANG PAJAK DAERAH

Bidang pajak daerah mempuyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pajak daerah.

Seksi pelayanan dan pengaduan

Seksi pelanyanan dan pengaduan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian bidang pajak daerah di bidang pelayanan dan pengaduan.

Seksi Penetapan dan Pembukuan

Mengumpulkan dan menganalisis data lingkup penetapan dan pembukuan.

Seksi Penagihan

Melakukan lingkup penagihan yang meliputi inventarisasi pajak terutang, penyampaian dan pendistribusian surat tagihan pajak, dan pelaksanaan penagihan

E. BIDANG PENDAPATAN BUKAN PAJAK DAERAH

Merencanakan dan menyusun program di bidang administrasi bagi hasil pajak pusat, administrasi bagi hasil pajak provinsi dan administrasi pelaporan pendapat bukan pajak daerah

Seksi Administrasi Bagi Hasil Pajak Pusat

Mengumpulkan dan menganalisa data lingkup administrasi bagi hasil pajak pusat

Seksi Administrasi Bagi Hasil Pajak Provinsi

Mengumpulkan dan menganalisa data lingkup administrasi bagi hasil pajak provinsi

Seksi Administrasi Pelaporan Pendapatan Bukan Pajak Daerah

Menyiapkan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup administrasi pelaporan pendapatan bukan pajak daerah

F. Bidang Pengendalian

Merencanakan dan menyusun program di bidang pembinaan internal, pengawasan dan pemeriksaan serta penyusunan, evaluasi dan monitoring

Seksi Pembinaan Internal

Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan lingkup pembinaan internal

Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan

Melaksanakan lingkup pengawasan dan memeriksa yang meliputi inventasi dan koordinasi penentuan objek dan subjek pengawasan dan pemeriksaan, pemrosesan pelanggaran penentuan pajak bekerja sama dengan instansi terkait

BAB IV

ANALISIS KERJA PRAKTEK

4.1.Analisis Sistam

4.1.1. Analisis Sistem Yang Sedang Berjalan

Analisis sistem yang sedang berjalan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui proses kerja yang sedang berjalan. Pokok-pokok yang dianalisis meliputi analisis prosedur atau aliran data, diagram konteks, dan data flow diagram. Ini dilakukan untuk mengevaluasi dan memberikan gambaran rencana pemecahan masalah yang dihadapi.

4.1.2. Analisis Prosedur

Proses kegiata dalam pemerintahan daerah dalam wacana perpajakan yang dilakukan oleh pemerintahan kota nbandung sendiri. Dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintah di Bidang Pendapatan Daerah berdasarkan asas otonomi (Memungut Pajak Daerah) dan Pembantuan (Dinas Perimbangan) menggunakan prosedur-prosedur yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota

(PERWAL) Nomor 330 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Prosedur Penetapan Pajak Daerah. Prosedur tersabut dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan suatu kegiatan agar lebih teratur

4.1.2.1 Flow map

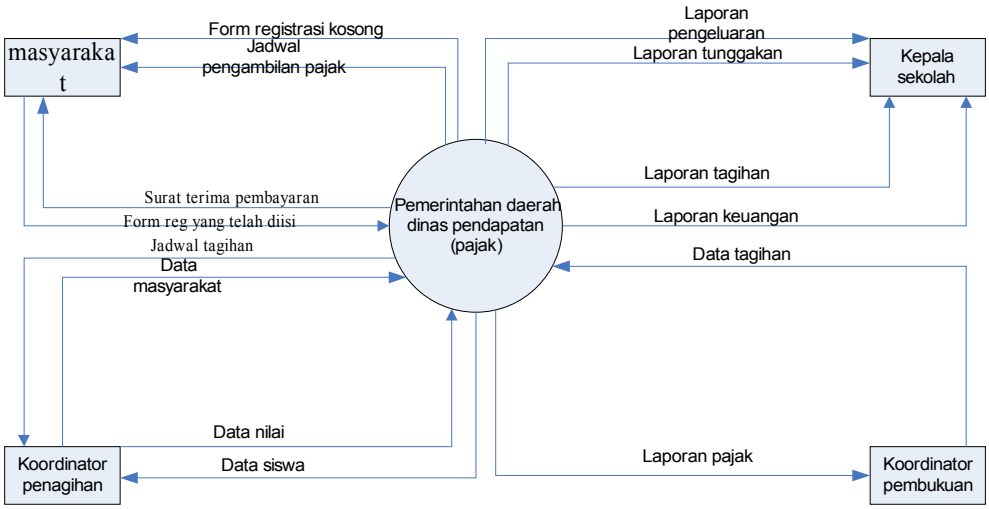
Flow Map adalah peta (map) yang menunjukan alir (flow) di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Peta alir digunakan terutama untuk alat bantu komunikasi dan untuk dokumentasi. Peta alir merupakan bagian dari informasi yang menerangkan proses-proses sistem informasi tersebut.

Untuk membantu analisis sistem yang berjalan maka dibuat flowmap atau bagan alir dokumen, seperti terlihat pada gambar berikut :

4.1.1.2 Diagram Konteks

Diagram Konteks Merupakan model grafis yang memperlihatkan sistem dalam bentuk paling umum/global dan digunakan untuk mendefinisikan serta memperlihatkan lingkup atau batas sistem yang akan ditelaah (area studi), disamping hubungannya dengan sistem lain. Diagram konteks menunjukan data yang mengalir dari dan ke terminator (asal data).

Berikut gambaran umum mengenai sistem informasi pemungutan pajak pemerintahan daerah yang sedang berjalan :



Gambar 4.6 *Diagram konteks sistem informasi pemungutan pajak*

4.1.1.2.1 Deskripsi Entitas Eksternal

Entitas eksternal yang terdapat di dalam perangkat sistem ini adalah masyarakat, koordinator penagihan, petugas pembukuan dan kepala bidang pajak daerah. Semua pengguna tersebut terlibat langsung di dalam proses kegiatan pajak daerah tersebut. sedangkan kepala bidang pajak daerah hanya menerima laporan-laporan dari sistem.

4.1.1.2.2 Deskripsi Proses

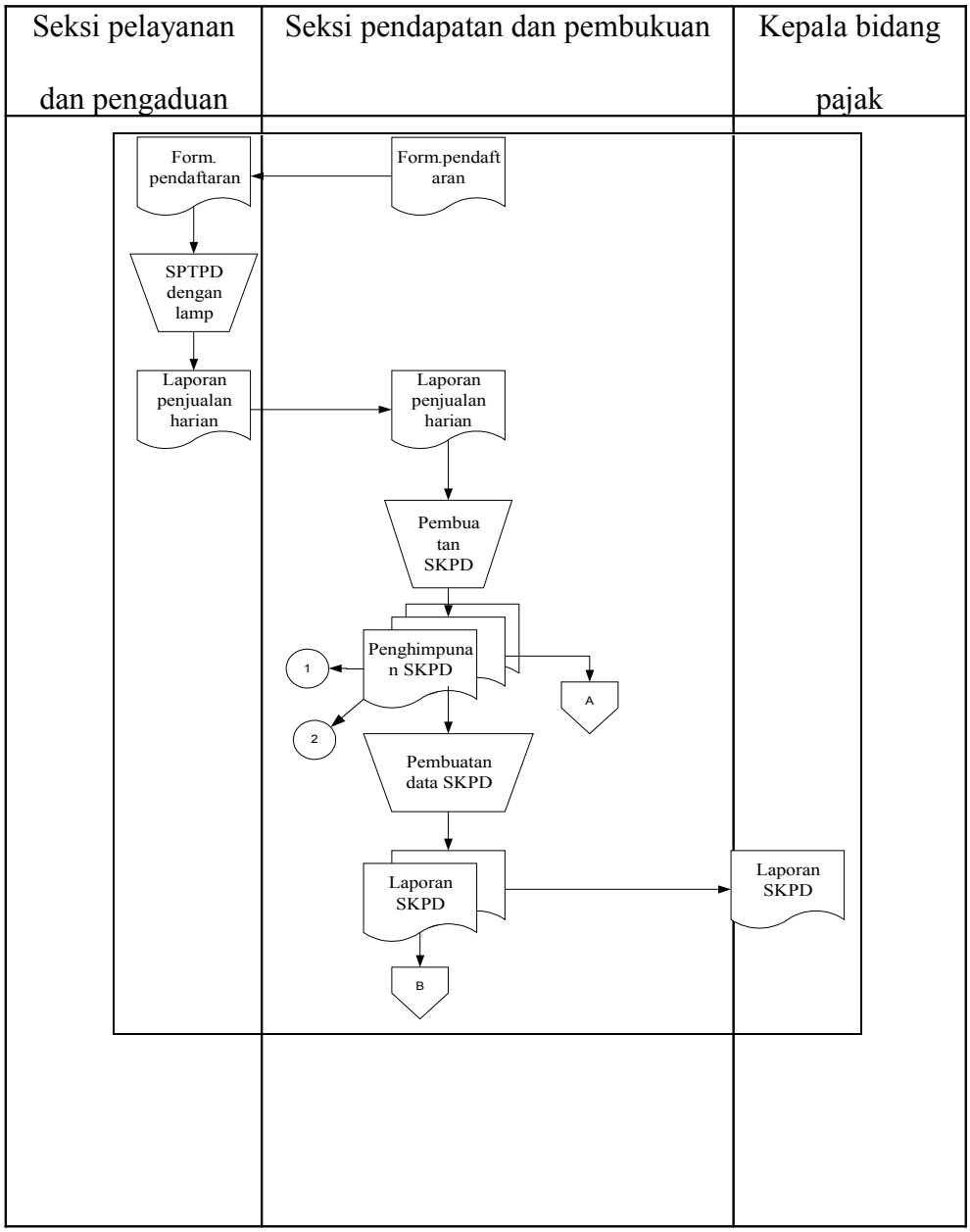
Proses kegiatan akademik memberi keluaran form registrasi kosong kepada siswa yang akan mendaftar kesekolah tersebut kemudian sistem menerima

masukan dari siswa berupa form registrasi yang telah diisi untuk diproses. Setelah resmi menjadi siswa sekolah tersebut siswa menerima jadwal pelajaran yang telah ditentukan. Entitas guru menerima masukan berupa data siswa dan jadwal pelajaran yang telah disetujui kemudian entitas guru memberi masukan kepada sistem berupa data guru dan data nilai. Data nilai tersebut akan diolah oleh sistem untuk diberikan kepada siswa, wali kelas dan kepala sekolah. Entitas wali kelas menerima laporan nilai dari sistem tersebut kemudian entitas wali kelas tersebut memberikan raport kepada sistem. Entitas kepala sekolah menerima laporan dari sistem tersebut berupa laporan nilai siswa, laporan data wali kelas, laporan data guru, dan laporan data siswa.

1. Prosedur pembuatan surat ketetapan pajak daerah

Surat ke tetapan pajak adalah bukti yang harus di miliki masyarakat. Adapun prosedur pembuatan surat ketetapan pajak itu sendiri,

bisa dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 4.1 *Flowmap registrasi pajak yang sedang berjalan*

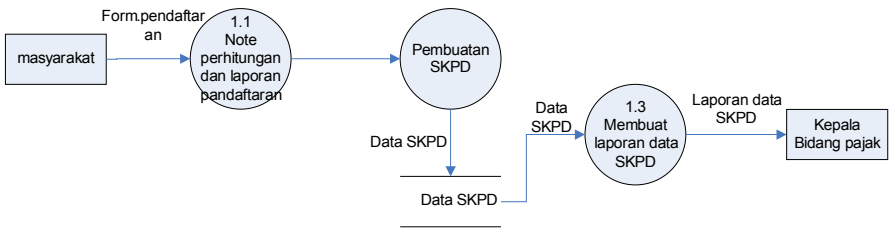
Keterangan:

A, 1, 2: Data masyarakat

B: laporan data masyarakat

4.1.1.4 DFD level 2 proses 1

DFD level 2 proses 1 merupakan pemecahan dari proses DFD level 1. pemecahan ini berguna untuk memperjelas proses dari DFD level 1. Berikut gambar dari DFD level 2 proses 1 :



Gambar 4.8 *DFD level 2 proses 1 Registrasi*

4.1.1.4.3 Deskripsi Proses

Masyarakat menerima form registrasi (pendaftaran) kemudian masyarakat yang bersangkutan tersebut mengisi form registrasi kosong dan kemudian mengembalikan form registrasi yang telah diisi tersebut untuk dicatat dan disimpan. Kemudian data form registrasi tersebut dibuat laporannya dan laporan mengenai masyarakat yang membuat surat ketetapan pajak tersebut diberikan ke kepala bidang perpajakan.

4.1.1.4.3 Deskripsi Aliran Data

Deskripsi aliran data dari DFD level 2 proses 1 dapat dilihat pada tabel berikut :

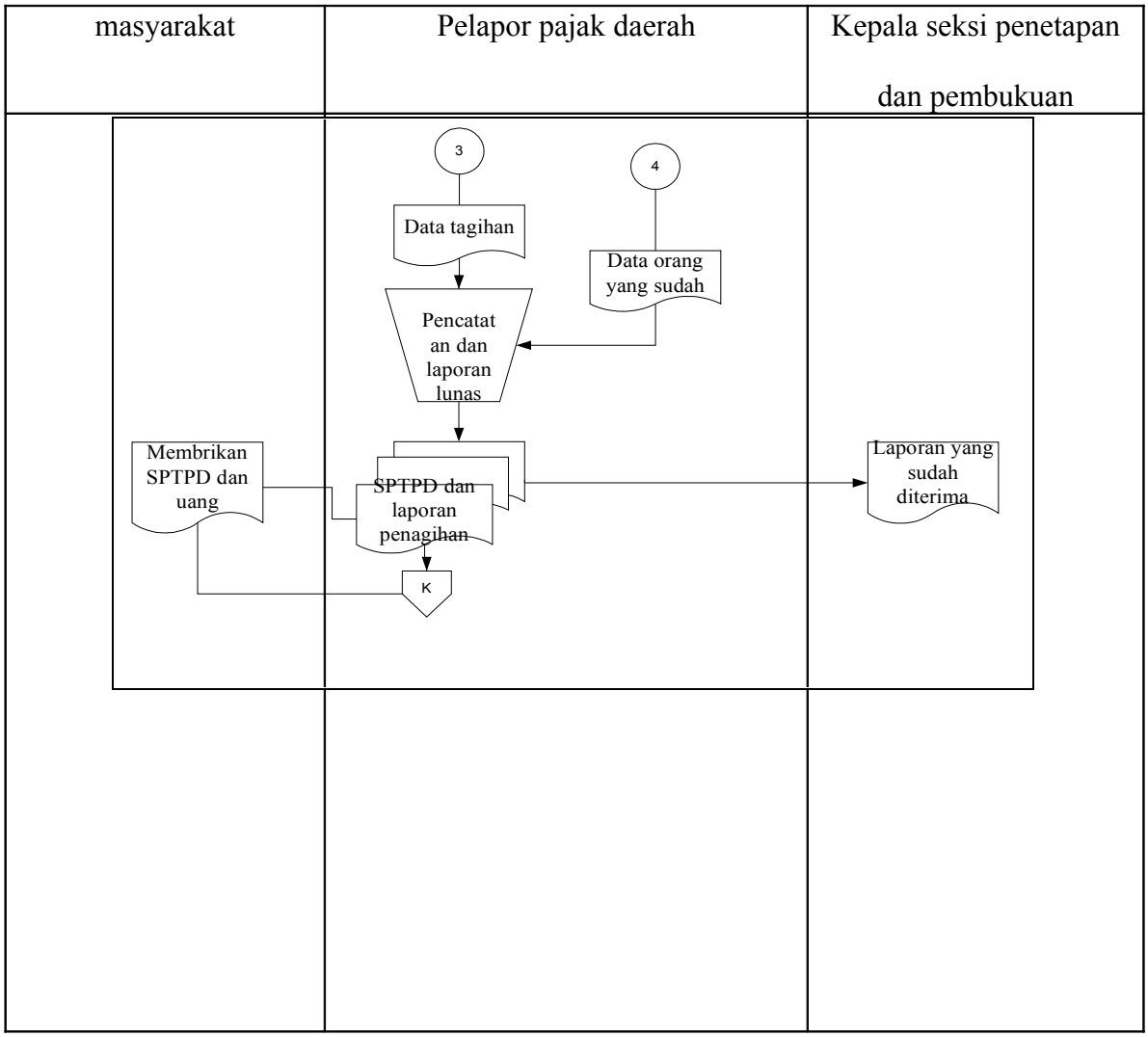
Tabel 4.3 *Deskripsi Aliran Data DFD level 2 proses 1*

No	Nama Aliran Data	deskripsi
1	Form registrasi kosong	form yang berupa masukan data masyarakat yang harus diisi oleh masyarakat ketika mendaftar
2	Form registrasi yang telah diisi	Form registrasi yang telah diisi oleh masyarakat
3	Data masyarakat yang baru mendaftar	Informasi tentang data diri masyarakat yang baru mendaftar
4	Data masyarakat yang baru mendaftar	Informasi tentang data masyarakat
5	Laporan data masyarakat	Laporan tentang data diri masyarakat

2. **Pemungutan pajak**

Setelah masyarakat itu sudah memiliki surat wajib pajak maka di setiap waktu tertentu pegawai pajak akan mengunjungi rumah-rumah.

Berikut adalah prosedur pemungutan pajak yang sedang berjalan:



Gambar 4.3 *Flowmap pemungutan pajak yang sedang berjalan*

Keterangan:

K: kartu SPTPD yang sudah di cap

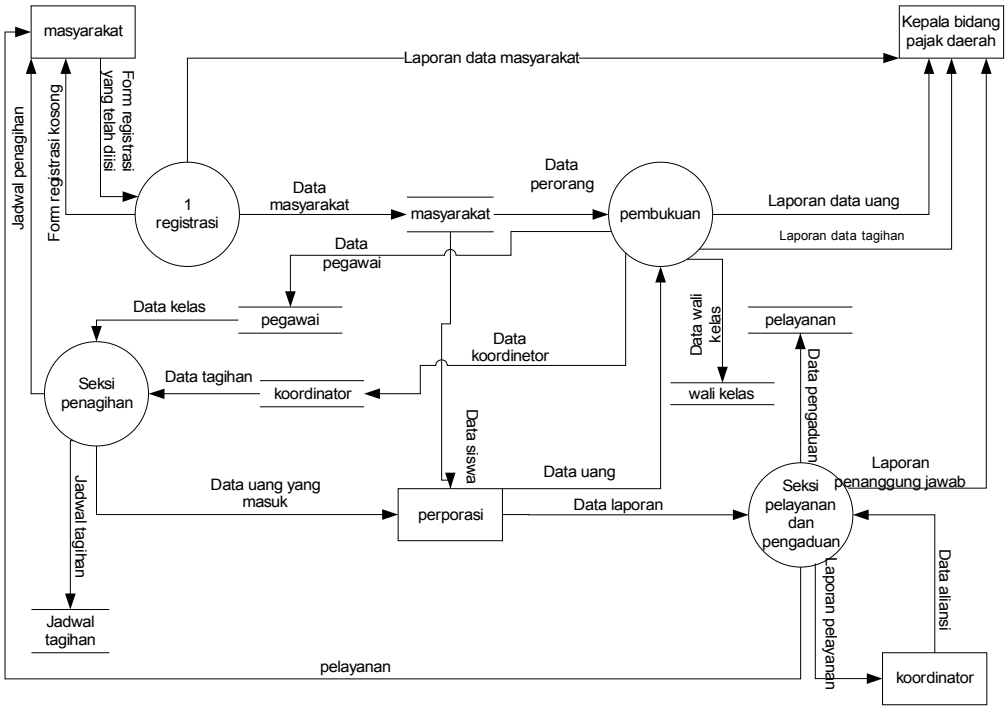
3: data tagihan yang balum di proses

4: bukti untuk petugas

4.1.1.3 DFD

Data Flow Diagram adalah suatu model logika data atau proses yang dibuat untuk menggambarkan darimana asal data dan kemana tujuan data yang keluar dari sistem, dimana data disimpan, proses apa yang menghasilkan data tersebut dan interaksi antara data yang tersimpan dan proses yang dikenakan pada data tersebut.

Berikut gambar dari DFD sistem informasi akademik yang sedang berjalan:



Gambar 4.7 *DFD level 1 Sistem Informasi perpajakan*

4.1.1.3.1 Deskripsi Entitas Eksternal

Seperti halnya diagram konteks yang terdapat pada bagian sebelumnya Entitas eksternal DFD level 1 adalah siswa, guru, wali kelas dan kepala sekolah. Dan Semua pengguna tersebut terlibat langsung di dalam proses kegiatan parpajakan tersebut.

4.1.1.3.2 Deskripsi Proses

Pada dasarnya proses yang terjadi di dalam DFD ini sama dengan proses di dalam diagram konteks yaitu Proses kegiatan akademik memberi keluaran form registrasi kosong kepada masyarakat yang akan mendaftar wajib pajak tersebut kemudian sistem menerima masukan dari masyarakat berupa form registrasi yang telah diisi untuk diproses. Setelah resmi menjadi seorang wajib pajak tersebut, dan orang yang wajib pajak menerima jadwal pemungutan pajak yang telah ditentukan. Entitas *coordinator* penagihan menerima masukan berupa data orang yang akan di tagih dan laporan tagihan yang telah disetujui kemudian entitas *coordinator* penagihan memberi masukan kepada sistem berupa data pembukuan dan data pengaduan. Data-data tersebut akan diolah oleh sistem untuk diberikan kepada kepala bidang pajak daerah, Entitas pembukuan menerima laporan

keuangan dari sistem tersebut kemudian entitas coordinator pembukuan juga menerima penetapan yang sudah tersedia system, dan memberikan laporan-laporan kepada sistem. Entitas kepala bidang perpajakan daerah menerima laporan dari sistem tersebut berupa laporan kegiatan perpajakan, laporan data penagihan, laporan data pembukuan, dan laporan data pengaduan.

4.1.1.3.3 Deskripsi Aliran Data

Berikut adalah deskripsi aliran data DFD level 1 :

Tabel 4.2 *Deskripsi Aliran Data DFD level 1*

No.	Nama Aliran Data	Deskripsi
1	Form Registrasi Kosong	form yang berupa masukan data masyarakat yang harus diisi oleh masyarakat ketika mendaftar
2	Form Registrasi yang telah diisi	Form registrasi yang berupa data lengkap tentang data masyarakat dan informasi lainnya yang dibutuhkan system.
3	Jadwal penagihan	Daftar tagihan yang akan dip roses yang akan di serahkan masyarakat
4	SPTPD	Kartu yang telah di berikan dari pemerintaha daerah, untuk setiap penagihan
5	Data SKPD	Data - data tentang orang yang telah mendaftar wajib pajak
6	Data pembukuan	Data-data tentang laporan- lapora keluar masuknya uang
7	Data tagihan	Data tantang tagihan-tagihan yang sudah ada

		SPTPD
8	Laporan penagihan	Laporan mengenai jumlah masyarakat yang sudah membayar dan masyrakat yang menunggak
9	Laporan pembukuan	Laporan tentang aluran keluar masuknya uang
10	Laporan pengaduan	Laporan tentang pengaduan data-data yang salah
11	Laporan data sangsi	Laporan tentang data-data masyarakat yang tarkana sangsi

4.1.1.2.3 Deskripsi Aliran Data

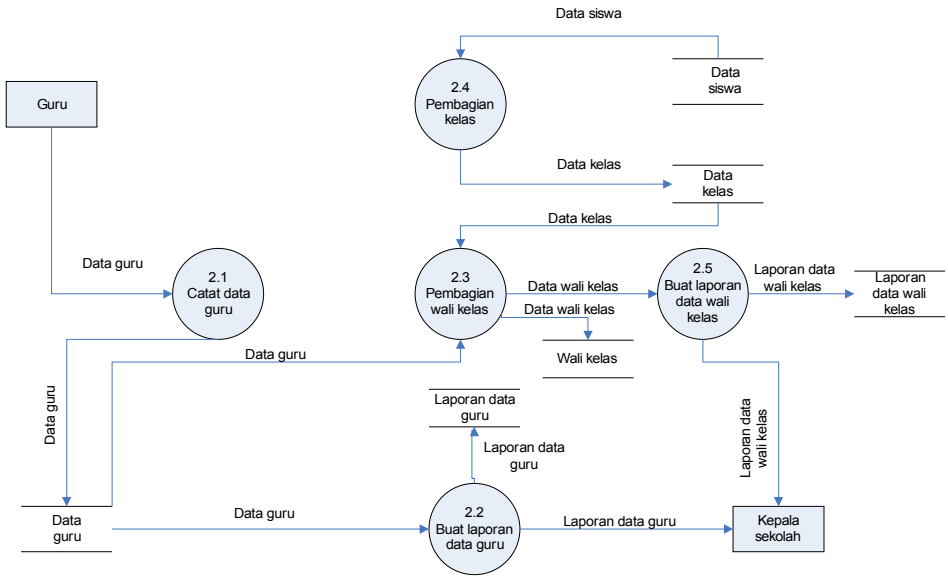
Deskripsi dari aliran data berguna untuk memperjelas aliran – aliran data yang terdapat dalam sistem. Deskripsi aliran data dapat dilihat pada tabel berikut:

4.1.1.4.1 Deskripsi Entitas Eksternal

Entitas eksternal yang ada di dalam level 2 proses 1 ini adalah penagihan dan kepala dinas pemerintahan dimana masyarakat adalah orang yang melakukan pendaftaran atau registrasi dan kepala sekolah adalah orang yang menerima laporan mengenai siswa yang mendaftar.

4.1.1.5 DFD level 2 proses 2

DFD level 2 proses 2 merupakan pemecahan dari proses DFD level 1. pemecahan ini berguna untuk memperjelas proses dari DFD level 1. Berikut gambar dari DFD level 2 proses 2 :



Gambar 4.9 *DFD level 2 proses 2pembagian kelas dan wali kelas*

4.1.1.5.1 Deskripsi Entitas Eksternal

Entitas eksternal di dalam DFD level 2 proses 2 adalah guru dan kepala sekolah.

4.1.1.5.2 Deskripsi Proses

Entitas Guru memberi informasi mengenai data guru ke proses catat data guru yang kemudian data guru tersebut disimpan di dalam file data guru. Data guru tersebut kemudian diproses untuk pembagian wali kelas. proses pembagian wali kelas menerima data dari guru dan data kelas dari proses pembagian kelas. Proses pembagian kelas tersebut menerima masukan dari data siswa dan menyimpannya ke dalam file data kelas. Setelah proses pembagian wali kelas proses berlanjut ke buat laporan data wali kelas dan laporan data wali kelas tersebut disimpan ke dalam file data wali kelas dan diberikan kepada kepada

entitas kepala sekolah . Proses buat laporan data guru menerima masukan dari file data guru kemudian laporan data guru tersebut di berikan kepada Entitas kepala sekolah.

4.1.1.5.3 deskripsi Aliran Data

Deskripsi aliran data dari DFD level 2 proses 2 dapat dilihat pada tabel berikut :

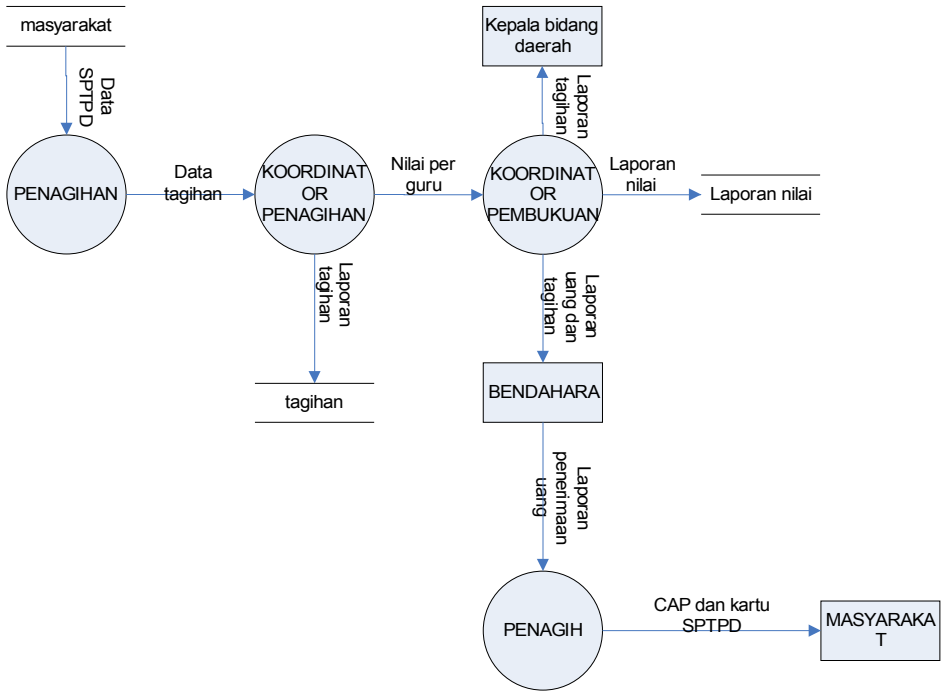
Tabel 4.4 *Deskripsi Aliran Data DFD level 2 proses 2 pembukuan pajak*

No.	Nama Aliran Data	Deskripsi
1	Form Registrasi Kosong	form yang berupa masukan data masyarakat yang harus diisi oleh masyarakat ketika mendaftar
2	Form Registrasi yang telah diisi	Form registrasi yang berupa data lengkap tentang data masyarakat dan informasi lainnya yang dibutuhkan system.
3	Jadwal penagihan	Daftar tagihan yang akan dip roses yang akan di serahkan masyarakat
4	SPTPD	Kartu yang telah di berikan dari pemerintaha daerah, untuk setiap penagihan
5	Data SKPD	Data - data tentang orang yang telah mendaftar wajib pajak
6	Data pembukuan	Data-data tentang laporan- lapora keluar masuknya uang
7	Data tagihan	Data tantang tagihan-tagihan yang sudah ada SPTPD
8	Laporan penagihan	Laporan mengenai jumlah masyarakat yang sudah membayar dan masyrakat yang menunggak

9	Laporan pembukuan	Laporan tentang aluran keluar masuknya uang
10	Laporan pengaduan	Laporan tentang pengaduan data-data yang salah
11	Laporan data sangsi	Laporan tentang data-data masyarakat yang tarkana sangsi

4.1.1.6 DFD level 1 proses 4

DFD level 1 proses 4 merupakan pemecahan dari proses DFD level 1. pemecahan ini berguna untuk memperjelas proses dari DFD level 1. Berikut gambar dari DFD level 1 proses 4 :



Gambar 4.10 *DFD level 1 proses 4 penagihan*

4.1.1.6.1 Deskripsi Entitas Eksternal

Entitas eksternal di dalam DFD level 1 proses 4 adalah penagih dan kepala dinas perpajakan.

4.1.1.6.2 Deskripsi Proses

Penagih memberikan tanggungan tagihan pajak kepada masyarakat, dengan meminta kratu wajib pajak. Setelah mengambil tagihannya petugas langsung memberikan laporan kepada coordinator penagihan yang langsung memberikan lagi kepada coordinator pembukuan yang akan dip roses ke sistam yang ada dan terakhir memberikan kepada kepala bidang daerah pemerin tahan kota bandung.

4.1.1.6.3 deskripsi Aliran Data

Deskripsi aliran data dari DFD level 1 proses 4 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.5 *Deskripsi Aliran Data DFD level 1 proses 4 penagihan*

No	Nama Aliran Data	Deskripsi
1	Data masyarakat	Data diri tentang masyarakat yang akan di ambil pajak
2	Data pajak	Data tentang pajak masyarakat
3	Pajak perdaerah	Data tentang nilai pajak yang akan di tetapkan kepada setipa orang yang bersangkutan dengan ketentuan pajak masing-masing
4	Laporan pajak	Laporan tentang pemungutan pajak
5	pajak yang telah disetujui	Pajak yang sudah disetujui oleh *coordinator* penagihan
6	Laporan pembukuan	Laporan pembukuan yang akan di serakan kepada kepala dinas pemerintahan

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengolahan data beserta pembahasannya maka didapat kesimpulan dari kerja peraktek ini sebagai berikut :

1. Pelaksanaan efektivitas pengendalian prosedur pemungutan pajak yang dilaksanakan pada Dinas Pendapatan Daerah kota Bandung dapat dikatakan belum cukup efektif.
2. Hubungan efektivitas pengendalian prosedur pemungutan pajak terhadap penerimaan pajak daerah yang diperoleh kesimpulan bahwa terdapat hubungan positif yang di signifikan antara efektivitas pengendalian prosedur pemungutan pajak dengan penerimaan pajak daerah, artinya hipotesis dari penelitian ini diterima. Sehingga dapat diketahui bahwa semakin rendah efektivitas pengendalian prosedur pemungutan pajak maka akan semakin rendah juga penerimaan pajak daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kerja praktek yang telah dilakukan, penulisan akan mengemukakan beberapa saran yang berkaitan dengan efektivatas pengendalian prosedur pemungutan pajak dan penerimaan pajak daerah, yaitu:

1. Pelaksanaan efektivitas pengendalian prosedur pemungutan pajak haruslah didasarkan pada langkah-langkah pengendalian yang tepat khususnya dalam menetapkan standar, agar lebih ditingkatkan kembali untuk tercapainya hasil yang optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan antara lain yaitu dengan melalui pelatihan-pelatihan, pemberian penyuluhan yang intensif dan peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan ektivitas pengendalian sahingga akan menciptakan kerjasama yang baik antara petugas pelaksana sebagai aparat dari Dinas Pendapatan Daerah kota Bandung dengan masyarakat sebagai wajib pajak.

   Sedangkan dalam rangka mengantisipasi terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh oknum aparat sebagai pemungut pajak maupun masyarakat sebagai wajib pajak, Dinas Pendapatan Daerah kota Bandung sebaiknya lebih mengintensifikan pola pengendalian yang lebih efektif dan efisien agar tidak terjadi penyelewengan diluar prosedur yang ditetapkan, dan juga penerapan *rule of law* yang lebih tegas dan konsiten perlu dilakukan untuk mengatasi tindak penyimpangan yang telah dilakukan baik oleh aparat maupun oleh masyarakat sebagai wajib pajak, agar terjadinya penyimpangan bias lebih terminimalisir.

2. Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak daerah terutama dari sektor pajak, Pemerintahan Daerah kota Bandung sebaiknya lebih meningkatkan pelaksanaan efektivitas pengendalian yang ditunjang pula oleh peningkatan kualitas kerja dengan penerapan konsep intensifikasi system pemungutan pajak yang selama ini sudah dilakukan agar lebih ditingkatkan kembali terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi baik yang menyangkut penyempurnaan system pemungutan, maupun penertiban administrasi pemungutan.